

The History of Prostitution in Yogyakarta during the Colonial Era

Sejarah Prostitusi di Kota Yogyakarta Pada Masa Kolonial

Alliyah Nur Khofifah

Universitas Negeri Yogyakarta

Jl. Colombo Yogyakarta No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. e-mail: alliyahnur.2020@student.uny.ac.id

Abstract

Prostitution is an illegal activity that has existed since the colonial era. The history of prostitution, especially in Yogyakarta, has existed for a long time. Yogyakarta, which is a tourism city, also has illegal destinations, such as prostitution. The history of prostitution began when there was a railroad construction project, prostitution activities also began to experience growth. But even so, the government did not just remain silent, that's why several policies were issued regarding this prostitution. Because at that time the existence of prostitution had quite a significant impact on the social, economic and health sectors. Departing from this, this study on prostitution aims to provide an overview of how prostitution began in Yogyakarta, and how the government has acted in dealing with this prostitution problem. This study uses historical research methods which use sources in the form of documents and literature studies that are in accordance with the subject matter of this study. There are several steps used, including heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that prostitution is a means of satisfying the sexual appetite of railroad project workers. In addition, because it experienced significant developments, in the end several policies were issued regarding this prostitution. because the existence of this prostitution has an impact on society, especially service providers and perpetrators of prostitution. Apart from that, it also has health impacts, such as the emergence of venereal diseases or what is known as syphilis.

Keywords: pasar kembang, prostitution, Yogyakarta

Abstrak

Prostitusi merupakan suatu kegiatan ilegal yang sudah ada sejak zaman kolonial. Sejarah mengenai prostitusi khususnya di Yogyakarta sudah ada sejak dulu. Yogyakarta yang merupakan kota pariwisata pun juga terdapat destinasi gelap, seperti prostitusi. Sejarah prostitusi bermula ketika adanya proyek pembangunan rel kereta api, kegiatan prostitusi juga mulai mengalami perkembangan. Namun meskipun begitu pemerintah tidak hanya tinggal diam, oleh sebab itulah dikeluarkan beberapa kebijakan mengenai prostitusi ini. Karena pada masa itu adanya prostitusi cukup memberikan dampak yang signifikan pada sektor sosial, ekonomi, dan juga kesehatan. Berangkat dari ini, kajian mengenai prostitusi ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana awal mula terjadinya prostitusi di Yogyakarta, serta bagaimana tindakan pemerintah dalam menangani permasalahan prostitusi ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mana menggunakan sumber berupa dokumen dan studi literature yang sesuai dengan pokok kajian ini. adapun beberapa langkah yang digunakan, antara lain yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya prostitusi ini sebagai sarana pemuas nafsu seksual para pekerja proyek jalur kereta api. Selain itu karena mengalami perkembangan yang cukup signifikan, pada akhirnya dikeluarkan beberapa kebijakan mengenai prostitusi ini. karena adanya prostitusi ini memberikan dampak kepada masyarakat, terutama penyedia jasa dan pelaku prostitusi. Selain itu juga memberikan dampak kesehatan, seperti munculnya penyakit kelamin atau bisa disebut dengan siphilis.

Kata kunci : pasar kembang, prostitusi, yogyakarta

1. PENDAHULUAN

Berkembangnya zaman dari masa ke masa nyatanya telah banyak memberikan perubahan, hal ini juga tak luput dari taraf kehidupan manusia. Perkembangan teknologi dan globalisasi pada masa ini sejujurnya memberikan sedikit banyak pengaruh terhadap kehidupan yang ada. Terjadinya banyak perubahan ini memberikan dampak bagi sebagian orang khususnya dalam hal beradaptasi. Sebab inilah yang pada akhirnya memunculkan adanya sebuah konflik-konflik yang bersifat eksternal maupun internal yang membuat beberapa orang pada akhirnya melakukan sebuah tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Salah satu bentuk penyimpangan norma atau penyakit masyarakat yang dianggap sebagai masalah sosial yaitu prostitusi.

Prostitusi dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan ini dianggap sebagai suatu masalah sosial yang ada di masyarakat. Pengertian dari prostitusi sendiri merupakan suatu perbuatan yang dalam kegiatannya melibatkan beberapa orang dalam sebuah kegiatan seksual tanpa adanya hubungan antara satu sama lain. Peristiwa ini sudah dikenal sejak ratusan tahun sebelum masehi dan senantiasa menjadi urusan sosial atau menjadi urusan hukum dan tradisi.

Sejarah mengenai prostitusi sangat panjang dan beragam di Indonesia. Mulai sebelum era kolonial, melalui upaya Belanda selama beberapa dekade untuk mengontrol praktik tersebut, hingga pelebagaan banyak aspek industri selama Pendudukan Jepang dan pada masa Orde Baru. Pada daerah-daerah tertentu di Indonesia pelacuran dianggap oleh orang tua sebagai bentuk pekerjaan yang dapat diterima untuk anak perempuan mereka, sementara kelompok agama pada umumnya mengutuk praktik tersebut. Dalam hal ini, pemerintah dan polisi mengambil tindakan dengan cara menangkap dan menuntut mucikari dan pelacur yang mengganggu ketertiban umum, tetapi melindungi dan mengelola kompleks rumah bordil resmi (lokalisasi) tempat ribuan gadis muda bekerja sebagai pelacur. Beberapa kompleks menyediakan 'rehabilitasi' dan pelatihan yang dimaksudkan untuk mengalihkan pekerja seks dari kegiatan tersebut, tetapi dampak dari program ini tampaknya minimal.

Sejarah pelacuran dapat ditelusuri sejak berlakunya sistem kolonial, yang ditandai dengan penamaan Gang Dolly dan beberapa tempat prostitusi yang sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Prostitusi telah menjadi sorotan beberapa waktu lalu, karena menyangkut dengan masalah moral, sosial dan agama. Prostitusi sering menjadi topik perbincangan, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan masalah yang berskala nasional ini. Prostitusi memiliki dimensi yang sangat kompleks sebab berkaitan erat dengan masalah penyimpangan tatanan nilai dan norma agama, budaya masyarakat serta terkait erat dengan masalah ekonomi, ketertiban dan kesehatan.

Jika ditinjau dari faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi, maka sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi dipengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang

Yogyakarta merupakan sebuah kota yang salah satunya menjadi destinasi wisata yang hampir selalu ramai oleh pengunjung dari berbagai daerah. Wisata yang disuguhkan pun tak hanya tempat-tempat bersejarah atau wisata yang berada di alam, namun juga terdapat tempat-tempat wisata malam yang bisa dikunjungi seperti yang terdapat di beberapa kota-kota lainnya. Wisata malam yang dapat dikunjungi di Yogyakarta yaitu seperti kafe, warung kopi, angkringan, club malam, diskotik, serta yang pasti tak luput yaitu tempat praktik prostitusi. Berdasarkan beberapa tempat yang disebutkan, tempat paling menarik untuk ditelisik lebih dalam yaitu tempat praktik prostitusi. Beberapa lokasi prostitusi yang terkenal di Yogyakarta yaitu Pasar Kembang (Sarkem), Bong Suwung, dan Giwangan.

Mengenai tulisan kali ini berpusat pada pengkajian mengenai sejarah prostitusi khususnya di Kota Yogyakarta. Adanya prostitusi ini nyatanya tidak bisa lepas dari gaya hidup masyarakat luar yang bebas. Seiring berjalannya waktu tidak dipungkiri motif-motif baru bermunculan untuk menutup wajah tempat prostitusi yang dibungkus dengan tempat hiburan yang tidak jarang digunakan sebagai sarana untuk melancarkan bisnis prostitusi agar terhindar dari pengawasan polisi dan pemerintah daerah. Berbagai

macam dampak dari adanya prostitusi ini bisa terbilang memiliki pengaruh hingga ke berbagai aspek kehidupan. Selain itu dampak pada kemerosotan moral juga terlihat dimana orientasi seksualitas dan psikologis masyarakat yang tinggal di wilayah prostitusi juga akan semakin liar.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan tulisan ini metode yang digunakan merupakan metode penelitian sejarah. Pengertian dari metode penelitian sejarah yaitu mengacu serta menganalisa secara kritis bukti-bukti peninggalan masa lampau atau sumber sejarah. Metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber secara ekstern maupun intern, interpretasi, dan historiografi. Pengertian dari heuristik sendiri ialah pencarian serta pengumpulan sumber sejarah. Pada tahap ini, sumber yang dikumpulkan harus berkaitan dengan informasi yang sesuai dengan peristiwa yang akan diteliti. Kemudian yaitu kritik sumber, yang berarti pada tahap ini sumber yang sudah dikumpulkan akan dianalisa secara kritis agar sumber yang digunakan bisa dijamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Tahap selanjutnya yaitu interpretasi yang berarti ini merupakan tahap dimana penulis dapat menggabungkan fakta-fakta sejarah yang sudah didapatkan setelah melewati kritik intern dan ekstern. Tahap terakhir yaitu historiografi atau penulisan. Pada tahap ini merupakan pemaparan atau laporan mengenai hasil penelitian yang telah disusun secara sistematis melalui tahap-tahap yang sudah dijelaskan sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Yogyakarta

Lahirnya Kota Yogyakarta bermula karena adanya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 atau bisa dikenal dengan nama Palihan Nagari (Margana, 2010). Adanya Perjanjian Giyanti merupakan kesepakatan antara VOC, pihak Kerajaan Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwana III, dan Pangeran Mangkubumi. Pada Perjanjian Giyanti ini menyatakan jikalau terdapat pembagian kerajaan. Kerajaan Kerajaan Mataram dibagi dua antara Sunan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi. Pada tahun 1757 wilayah kekuasaan Sunan Pakubuwana III dibagi menjadi dua wilayah yang menjadi Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Sementara itu, untuk wilayah Yogyakarta juga terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman.

Letak geografis Kota Yogyakarta terbentang antara 110°24'19' sampai 110°28'53' Bujur Timur dan 07°15'24' sampai 07°49'26' Lintang Selatan. Kawasan Kota Yogyakarta telah melewati berbagai macam perubahan struktur sejak berdirinya. Secara garis besar, Kota Yogyakarta mengalami perkembangan secara drastis. Pada awal berdirinya Kota Yogyakarta hanya memiliki luas 9,7 km pada 1756, namun telah berubah menjadi 13,5 km² pada 1824. Hingga pada tahun 1920 Kota Yogyakarta memiliki luas 20,68 km² dengan banyak penduduk berkisar 134.231 orang. Jumlah penduduk rata-rata per km² sebanyak 6.490,86 orang.

Sekitar pertengahan abad ke-19 banyak terjadi perubahan di kawasan nusantara, namun hal tersebut berlaku bagi dalam kehidupan masyarakat. Walaupun pada masa itu lumayan cukup banyak memberikan kemajuan, tetapi sangat disayangkan bahwa pada wilayah pedalaman Jawa masih mengalami ketertinggalan. Hal tersebut cukup menyedihkan, sebab masyarakat saat itu banyak yang terserang wabah, kurangnya bahan pangan yang menyebabkan terkena busung lapar dan gizi buruk. Sedangkan bagi para kolonial Belanda pada masa itu memiliki kehidupan yang serba tercukupi tanpa adanya kekurangan sedikitpun. Ketimpangan sosial ekonomi ini cukup memberikan gambaran mengenai kondisi pada masa itu. Sebab pada masa itu hanya golongan kolonial Belanda yang diuntungkan, sedangkan masyarakat pribumi lebih banyak yang dirugikan.

Kota Yogyakarta pastinya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Adanya perkembangan ini tentu akan membawa berbagai perubahan tak luput juga sebuah permasalahan. Hal yang paling menonjol yaitu ketika berubahnya Kota Yogyakarta yang sebelumnya merupakan kota tradisional

menjadi kota modern. Kota Yogyakarta mengalami perubahan setelah tahun 1870. Proses liberalisasi ekonomi yang dimulai setelah pemberlakuan UU Agraria telah memberikan dampak baik pada sektor perdagangan dan industri, meluasnya administrasi sipil, serta menyebabkan peningkatan populasi perkotaan di Jawa (Wertheim, 1999).

Awal Mula Prostitusi di Kota Yogyakarta

Kegiatan mengenai prostitusi ini sudah muncul di berbagai wilayah sejak zaman kolonial. prostitusi sendiri berasal dari bahasa latin pro-stituere atau pro-stauree yang memiliki arti memberikan diri melakukan zina, pencabulan, dan persundalan (Purnomo, 1993). Pemahaman lain mengenai prostitusi yaitu aktivitas yang dilakukan manusia berupa menjajakan atau menyewakan tubuhnya untuk memuaskan hasrat seksual orang lain dengan mengharapkan sebuah imbalan berupa upah atau hal bernilai lainnya (Ensiklopedi Jilid 3, 1990). Prostitusi merupakan sebuah fenomena yang umum terjadi di kalangan masyarakat. Hampir di setiap wilayah yang terdapat di dunia ini pasti memiliki tempat praktik prostitusi. Kegiatan prostitusi ini sudah ada sejak zaman dahulu, dimana yang ditawarkan merupakan jasa seksual yang memberikan sebuah kepuasan, sehingga hingga saat ini kegiatan prostitusi sulit untuk dihapuskan karena memiliki keterkaitan dengan kebutuhan ekonomi pelakunya. Dibalik kegiatan prostitusi ini tentu terdapat beberapa faktor yang mendorong para pelaku untuk menjadi seorang pelacur. Biasanya faktor yang paling utama yaitu terkait dengan sosial ekonominya. Selain faktor sosial ekonominya, juga terdapat faktor kejiwaan, moralitas yang rendah dan kurang berkembang, serta kepuasan secara jasmani dan rohani.

Menjadi seorang pelacur bukanlah sebuah keinginan. Mereka yang pada akhirnya terjun ke dunia gelap seperti prostitusi tentu sudah siap menerima berbagai macam konsekuensi. Menjadi seorang pelacur tentu saja pasti akan mendapat pandangan negatif dari orang sekitar. Sebab mereka akan menganggap seorang pelacur sebagai orang yang hina dan menjijikan. Namun disamping itu, beberapa orang pun juga merasa simpati kepada para pelacur. Seorang pelacur rela untuk menjajakan tubuhnya, menjual kehormatannya, dan memuaskan hasrat seksual sang pelanggan hanya demi agar mendapat imbalan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Karena pada masa itu mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari cukup sulit, belum lagi pada masa itu pemerintah kolonial Belanda sudah memberlakukan beberapa kebijakan yang menyulitkan hidup masyarakat kecil.

Para pekerja seks di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis, salah satunya yaitu pekerja seks yang berbentuk lokalisasi. Tipe pekerja seks ini bisa dicirikan antara lain yaitu biasanya lokalisasi ini berada di lokasi yang bercampur menjadi satu dengan perumahan penduduk, berada di suatu kompleks, dan yang terakhir yaitu bisa juga berada di sebuah wilayah yang khusus serta berada jauh dari kawasan penduduk. Di Yogyakarta sendiri terdapat beberapa tempat lokalisasi, antara lain Pasar Kembang, Bong Suwung, dan Giwangan. Bong Suwung sendiri berada di wilayah Kecamatan Jetis, Kelurahan Bumijo, berada di antara perbatasan Jlagran dan Badran. Sedangkan di Giwangan sendiri dulunya dikenal dengan nama Sanggrahan atau disingkat menjadi SG. Lokasi prostitusi ini bertempat di Kecamatan Umbulharjo, dekat dengan sungai Gajah Wong. Namun pada pembahasan ini hanya akan menyinggung mengenai Pasar Kembang.

Pasar Kembang merupakan salah satu tempat lokalisasi yang masih eksis hingga masa kini. Pasar Kembang atau lebih familiar dengan sebutan Sarkem merupakan sebuah daerah yang berada di pusat Kota Yogyakarta. Pasar Kembang sendiri merupakan wilayah yang cukup familiar di kalangan masyarakat Yogyakarta. Secara administratif Pasar Kembang berada di wilayah kecamatan Gedong Tengen, lebih tepatnya di RW Sosrowijayan Kulon. Selain dikenal dengan sebutan Sarkem, orang sekitar juga sering menyebutnya Gang Tiga, sebab keberadaannya sendiri berada di gang ketiga dari Timur Pasar Kembang.

Pasar Kembang sendiri sudah ada sejak era kolonial Belanda. Pembangunan jalur kereta api pada mulanya bertujuan sebagai sarana pengangkut hasil kebun, namun ternyata memberikan dampak lain terhadap kehidupan masyarakat sekitar khususnya pada sektor sosial ekonomi. Adanya sektor perkebunan dan pembangunan jalur kereta api ini ternyata menjadi sesuatu yang berpotensi sebagai jalan pembuka bagi perkembangan sebuah wilayah. Pembangunan rel kereta api dari Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung,

Cilacap, Yogyakarta, dan Surabaya pun memberikan dampak seperti bertambahnya pemukiman dan fasilitas lain yang bersamaan dengan pembangunan jalur kereta api tersebut. Hal ini juga menjadi salah satu alasan yang menyebabkan munculnya kegiatan prostitusi di wilayah tempat pembangunan proyek jalur kereta api tersebut.

Munculnya tempat lokalisasi di Pasar Kembang pada awalnya dikarenakan para buruh yang mulai merasakan jenuh selama menjalankan proyek jalur kereta api pada akhirnya melipir mencari sebuah hiburan ketika mereka senggang. Tidak hanya para buruh, tentara Belanda pun juga turut ikut mencari hiburan dikala mereka membutuhkan sebuah hiburan serta kepuasan seksual. Namun seiring berjalannya waktu ternyata para pelacur juga mulai melayani para penumpang kereta api yang berdatangan dari berbagai wilayah. Hal inilah yang menjadi awal mula bagaimana Pasar Kembang mulai dioperasikan menjadi sebuah tempat lokalisasi.

Memasuki tahun 1970an Pasar Kembang menjadi wilayah yang cukup terkenal dan memiliki sebutan Pasar Kembang Balokan. Asal-usul nama Balokan sendiri bermula karena tepat di utara letak Pasar Kembang berada terdapat sebuah tempat yang digunakan untuk meletakkan balok kayu berukuran besar yang digunakan sebagai bahan bakar kereta. Seiring berjalannya waktu, bisnis prostitusi ini bertumbuh dengan cepat. Pemerintah yang melihat keadaan tersebut merasa bahwa hal ini sangat tidak baik. Pada akhirnya tahun 1974, kepala daerah yang memimpin pada saat itu mengambil sebuah tindakan guna mencegah terjadinya suatu yang tidak diinginkan dengan cara mengeluarkan keputusan kepala daerah No. 166/K.D/1974 tentang penunjukan tempat untuk proyek resosialisasi wanita tuna susila di Yogyakarta, dengan mengambil tempat pelaksanaan di sebelah selatan Desa Mrican.[-

Pemindahan para pelacur serta mucikari dari Pasar Kembang ke selatan Desa Mrican berjalan dengan lancar. Tidak hanya para pelacur serta mucikari, namun juga terdapat para pengemis serta gelandangan yang tidak memiliki tempat tinggal. Namun kemudian pada tahun 1997 Walikota Yogyakarta mengeluarkan Keputusan Nomor: 408/KD/Tahun 1997 tentang pencabutan keputusan Walikota Yogyakarta No. 166/K.D/1974 tentang penunjukan tempat untuk proyek resosialisasi wanita tuna susila. Karena dikeluarkannya keputusan tersebut membuat para mucikari serta pelacur pada akhirnya kembali ke Pasar Kembang.

Seiring berjalannya waktu Pasar Kembang mulai kembali pada sedia kala, bahkan bisa terbilang lebih ramai daripada sebelumnya. Karena pada saat itu pekerja seks di sana semakin bertambah banyak, losmen yang sebelumnya hanya terdapat di sebelah utara Sosrowijayan Kulon akhirnya bertambah hingga memasuki wilayah selatan Sosrowijayan Kulon. Ramainya wilayah Pasar Kembang tidak luput dari pandangan para masyarakat sekitar wilayah tersebut. Mereka mulai memanfaatkan hal tersebut dengan membangun usaha yang sekiranya bisa memberikan mereka keuntungan. Pasar Kembang telah dianggap sebagai tempat tinggal merangkap tempat usaha yang dapat mereka jadikan sebagai pemasukan untuk kehidupan sehari-hari. Sosrowijayan Kulon yang sebelumnya hanya dianggap sebagai sebuah kampung biasa seiring berjalannya waktu telah bertumbuh menjadi sebuah lahan bisnis prostitusi yang mana disana para perempuan menjajakan tubuhnya dengan cara memberikan kepuasan seksual kepada pembelinya.

Kebijakan Pemerintah Yogyakarta terhadap Prostitusi

Persoalan mengenai prostitusi ini tentu saja tak lepas dari perhatian pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam usahanya, pemerintah sudah berusaha dalam mengatasi mengenai persoalan prostitusi ini dengan cara memberi kegiatan untuk para PSK, membuka beberapa lapangan kerja, memberikan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan. Usaha pemerintah dalam menangani masalah prostitusi ini bisa dikatakan cukup serius. Pemerintah sendiri menolak adanya kegiatan prostitusi ini, sebab di Indonesia khususnya Yogyakarta sendiri prostitusi merupakan sebuah kegiatan yang ilegal dan dianggap tidak menjunjung nilai moral, etika, kesusilaan dan agama.

Adapun beberapa kebijakan dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan pelacuran ini. Peraturan pertama yaitu terdapat pada Rijksoverheid no. 19 tahun 1924 mengenai larangan

rumah serta bangunan yang digunakan sebagai tempat pelacuran. Kedua terdapat pada Perda no. 15 tahun 1954 mengenai penutupan rumah-rumah pelacuran. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa rumah pelacuran yang dimaksud yaitu rumah atau bangunan lainnya, yang mana termasuk dengan wilayah yang digunakan sebagai tempat pelacuran. Selain itu juga menjelaskan peraturan mengenai penutupan lokasi yang dianggap menjadi praktik prostitusi dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang dianggap sudah melanggar peraturan tersebut. Ketiga yaitu Perda no. 18 tahun 1954 mengenai larangan pelacuran di tempat umum dengan beberapa pasal di dalamnya:

- Pasal 1 yaitu berisi “Tindakan orang-orang yang menyerahkan badannya untuk berbuat zina dengan mendapat upah”
- Pasal 2 berisi “Yang dimaksud dengan tempat-tempat umum ialah jalan-jalan, tanah-tanah lapang, ruangan-ruangan dan lain sebagainya yang oleh umum mudah dilihat atau didatangi”
- Pasal 3 berisi “Barang siapa yang ada di tempat umum, dilarang membujuk orang lain, baik dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, isyarat-isyarat maupun dengan cara-cara lain yang bermaksud untuk melakukan perbuatan mesum (pelanjahan)”
- Pasal 4 berisi “Barangsiapa yang karena tingkah lakunya bagi pejabat-pejabat polisi menimbulkan dugaan bahwa mereka tergolong orang yang akan melakukan perbuatan mesum, sesudah mereka mendapat peringatan, maka mereka dilarang berada di tempat umum itu”
- Pasal 5 berisi “Pelanggaran terhadap pasal 3 dan pasal 4 dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda setinggi-tingginya seratus rupiah”.

Selain kebijakan yang sudah disebutkan, terdapat beberapa kebijakan lain seperti:

- Putusan Kepala Daerah Nomor 166/KD/1974 yang berisi mengenai Penunjukan Tempat bagi Proyek Resosialisasi Wanita Tuna Susila di Kota Yogyakarta.
- Putusan Walikota Yogyakarta Nomor 17/K.D/1974 mengenai Tim Pelaksana Proyek Resosialisasi Wanita Tuna Susila.
- Surat Perintah Walikota PJ Sekwilda Nomor 02940/01040/Sek/1976 mengenai Perintah Pelaksana Pemandangan Mucikari dan Anak Buahnya.
- Instruksi Walikota Nomor 01/IN/1976 mengenai Mengintensifkan dan Menertibkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1954.
- Putusan Walikotaq Nomor 93/K.D/1977 mengenai Pemisahan Jalur antara Areal Resosialisasi Wanita Tuna Susila dengan Perkampungan Umum Sekitar.
- Putusan Gubernur Nomor 54/TIM/1989 mengenai Pembentukan Tim Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, Wanita Tuna Susila di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Putusan Walikota Nomor 1040/K.D/1993 mengenai Pola Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Wanita Tuna Susila.
- Putusan Walikota Nomor 166/K.D/1974 mengenai Penunjukan Wilayah untuk proyek Resosialisasi Wanita Tuna Susila.

Munculnya kegiatan mengenai prostitusi ini tentu saja bukan keinginan setiap orang. Beberapa Undang-Undang pun telah diluncurkan dengan harapan agar kegiatan prostitusi ini segera berakhir. Sejujurnya kegiatan prostitusi ini ingin dihapuskan hingga ke akar-akarnya, namun tampaknya hal ini cukup sulit sebab prostitusi sendiri sudah seperti budaya yang mendarah daging. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dengan harapan agar persoalan mengenai pelacuran ini segera berakhir. Namun, jikalau pemerintah dalam mengatasi masalah mengenai pelacuran ini hanya melalui pendekatan regulasi rasanya akan sulit, dikarenakan beberapa faktor yang menjadi penyebab pelacuran. Bahkan setelah diterbitkannya beberapa kebijakan pemerintah, persoalan mengenai pelacuran masih tetap berjalan. Ini membuktikan bahwa persoalan mengenai prostitusi bukan hal yang mudah untuk diberantas hingga akar-akarnya. Sehingga dalam hal ini rasanya pemerintah memerlukan penegak hukum dengan harapan agar menindak persoalan ini dengan cara yang lebih tegas lagi.

Dampak dari Prostitusi

Munculnya prostitusi atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sejenisnya tentu memberikan sebuah dampak atau pengaruh dalam kehidupan, contohnya dalam bidang sosial, ekonomi dan juga kesehatan. Walaupun pemerintah juga turut andil dengan mengeluarkan sebuah kebijakan, namun nyatanya kegiatan prostitusi ini tetap berjalan. Adanya kegiatan prostitusi ini nyatanya memberikan dampak pada sektor sosial ekonominya, hal ini dapat dilihat dari adanya warung, penginapan, serta warung makan. Fasilitas-fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh pelaku prostitusi untuk melayani para tamunya. Mereka memanfaatkan sebuah penginapan dengan cara menyediakan jasa seksual. Dengan adanya kegiatan tersebut memberikan dampak ekonomi bagi para pelacur dan masyarakat sekitarnya. Para pelacur yang menjual jasa seksualnya tentu akan menerima upah atas pekerjaan, berupa uang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan bagi masyarakat yang membuka jasa penginapan dan warung tentu juga mendapat sebuah keuntungan dari hal tersebut.

Dampak lain dari adanya prostitusi yaitu mengenai kesehatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ini bukan merupakan hal yang tabu. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus mengenai dampak dari berhubungan seksual. Sebab ketika melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang tidak diketahui kebersihannya, hal ini bisa menjadi salah satu penyebabnya menularnya penyakit kelamin. Penyakit ini mudah menular dari satu ke yang lainnya, terutama bagi seseorang yang sering melakukan hubungan seksual. Salah satu penyakit kelamin yang dapat menular yaitu sifilis. Penyakit sifilis ini sempat menjangkit para tentara militer Belanda yang sering melakukan hubungan seksual dengan para pelacur. Pada masa itu penyakit sifilis sempat menyebar dan meluas, namun sayangnya fasilitas kesehatan belum memadai seperti saat ini. Berbagai macam saran telah diberikan, namun rasanya tetap percuma sebab kegiatan prostitusi pada masa itu tetap berjalan dan penyebaran penyakit semakin meluas. Sehingga dibutuhkan usaha lebih demi mengurangi penyebaran terhadap penyakit sifilis ini. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran sifilis yaitu dibuat sebuah mini brosur mengenai penyakit tersebut yang mana kemudian disebarakan kepada masyarakat.

4. KESIMPULAN

Prostitusi merupakan salah satu sektor gelap yang sudah ada sejak masa kolonial. Sejarah mengenai prostitusi sangat panjang, apalagi di Kota Yogyakarta. Hadirnya prostitusi di Yogyakarta bermula ketika adanya proyek mengenai pembangunan jalur kereta api. Para pekerja dan tentara pada masa itu yang membutuhkan sebuah hiburan dan kepuasan seksual pada akhirnya memilih untuk “jajan”. Terdapat beberapa lokalisasi pada masa itu, antara lain Pasar Kembang, Bong Suwung, dan Giwangan. Namun salah satu lokalisasi yang cukup terkenal pada saat itu yaitu Pasar Kembang. Lokalisasi Pasar Kembang pada masa itu cukup ramai dan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Beberapa faktor juga menjadi pendukung adanya prostitusi. Faktor sosial dan ekonomi menjadi permasalahan dalam kasus ini. Karena faktor tersebut pada akhirnya membuat seseorang pada akhirnya terjun menuju dunia gelap. Berkembangannya prostitusi ini tentu saja menjadi sebuah problem bagi pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga pada saat itu dibuatlah sebuah kebijakan mengenai prostitusi. Pemerintah pada saat itu sudah mengupayakan berbagai macam cara bagi para Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan cara memberi mereka kegiatan bermanfaat, membuka lapangan pekerjaan, dan memberikan fasilitas kesehatan. Dalam menangani permasalahan prostitusi ini pemerintah cukup serius, sebab prostitusi bukanlah masalah sepele, apalagi di negara Indonesia ini prostitusi dianggap sebagai suatu tindakan yang ilegal. Karena hal ini akhirnya mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai persoalan ini. Namun nyatanya menangani persoalan mengenai prostitusi bukan hal yang mudah. Walaupun sudah dibuat beberapa kebijakan prostitusi, nyatanya tetap berjalan hingga saat ini. Sehingga diharapkan untuk pemerintah agar bekerja lebih keras lagi dalam menangani permasalahan mengenai prostitusi ini.

Adanya prostitusi ini tentu saja memberikan dampak dalam hal sosial, ekonomi, serta kesehatan. Dampak tersebut bisa dilihat dari adanya sebuah warung dan penginapan yang memberikan jasa seksual.

Tentunya hal ini memberikan keuntungan satu sama lain, antara penyedia jasa dan juga sang PSK. Namun tentu saja terdapat dampak buruk berupa adanya penyebaran penyakit sifilis. Penyakit tersebut merupakan penyakit kelamin yang dapat menular. Diduga penyebaran penyakit ini ditularkan oleh para PSK. Sehingga pada saat itu sampai dibuatkan sebuah pengumuman mengenai bagaimana cara mengurangi penyebaran penyakit ini. Sebab pastinya tidak ada yang ingin penyakit ini menyebar makin meluas. Diharapkan bahwa persoalan mengenai prostitusi ini di masa mendatang bisa teratasi dengan maksimal, sehingga tidak ada lagi persoalan seperti ini lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Artosa, A. O. (2018). Pekerja Migran dan Ekonomi Informal Ilegal (Prostitusi) di Wilayah Pasar Kembang, Yogyakarta. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 5 No. 1.
- Basundoro, P. (2004). *Pengantar Sejarah Kota*. Ombak.
- Boomgaard, P. (2004). *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*. Djambatan.
- Brahmanto, E. (2015). *Praktek Prostitusi dan pengaruh Trend Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kota Yogyakarta*. *Jurnal Pariwisata*, Vol. 2 (1).
- Ernawati, I. R. (2001). *Pelacuran dan Kehidupan Sosial Ekonomi Kota Batavia 1900-1940*. Universitas Gajah Mada.
- Goenawan, R., & Harnoko, D. (1993). *Sejarah Sosial Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas Sosial DI. Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluhan (S. Sutanto, Ed.)*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional .
- Hoigard, C., & Finstad, L. (2008). *Tubuhku Bukan Milikku: Prostitusi, Uang, dan Cinta*. Pustaka Pelajar.
- Hull, T. H., Sulistyarningsih, E., & Jones, W. G. (1997). *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Pustaka Sinar Harapan.
- Kutoyo, S. (1997). *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Margana, S. (2010). *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769- 1874*. Pustaka Pelajar.
- Mudjijono. (2019). *Sarkem: Reproduksi Sosial Pelacuran*. Gadjah Mada University Press.
- Negari, A. (2019). *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Nurgiansah, T. H. (2020). Fenomena Prostitusi Online di Kota Yogyakarta dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 27. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.14208>
- Pratama, D. (2016). *Penegakan Hukum Atas Praktek Prostitusi di Yogyakarta (Studi Atas Praktek Prostitusi di Rel Kereta Api Ngebong Kecamatan Gedong Tengen Yogyakarta)*. UIN Sunan Kalijaga.
- Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. PT Serambi Ilmu Semesta.
- Sari, D. R. (2012). *Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pelacuran*. *Supremasi Jurnal Hukum*, 1(1).
- Soemardjan, S. (1986). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Gadjah Mada University Press.
- Surjomihardjo, A. (2000). *Kota Yogyakarta 1880-193; Sejarah Perkembangan Sosial*. Yayasan Untuk Indonesia.
- Suyono, R. P. (2005). *Seks dan Kekerasan Pada Zaman Kolonial*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syahfrullah, A. (2020). *Seks dan Modernitas: Transformasi Tempat Prostitusi di Jawa Pada Awal Abad XX*. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 1(1).
- Truong, T. D. (1992). *Seks, Uang, dan Kekuasaan: Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*. LP3ES.